

EFFECTIVENESS OF BUDGET PLANNING AND COORDINATION ON EDUCATION EXPENDITURE BUDGET ABSORPTION

EFEKTIVITAS PERENCANAAN ANGGARAN DAN KOORDINASI TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PENDIDIKAN

Mahdi^{1*}, Fitriningsih Amalo², Supratman³, Nunut Asniar⁴, Bambang Surahman⁵

Universitas Serambi Mekkah¹

Universitas Muhammadiyah Kupang²

UNDIKMA³

Institut Dharma Bharata Group⁴

Universitas Gajah Putih⁵

mahdi@seratmbimekkah.ac.id^{1*}, fitriningsihamalo@gmail.com²,

supratman@undikma.ac.id³, asniarnunut54@gmail.com⁴, bambang.aceh@gmail.com⁵

ABSTRACT

Education has a very important role in the development of a country, because quality education is the foundation of sustainable social and economic development. The aim is to analyze the effectiveness of budget planning and coordination on the absorption of the education expenditure budget. The research method used is a literature study or Library Research with a qualitative approach. Based on the literature review in this article, it can be concluded as follows (1) Budget planning affects the effectiveness of the absorption of the education expenditure budget. (2) Coordination affects the effectiveness of the absorption of the education expenditure budget.

Keywords: *budget planning, coordination, education spending budget*

ABSTRAK

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu negara, karena pendidikan yang berkualitas adalah pondasi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menganalisis Efektivitas Perencanaan Anggaran dan Koordinasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature atau Library Research dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan kajian literature review pada artikel ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut (1) Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan. (2) Koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan.

Kata kunci: perencanaan anggaran, koordinasi, anggaran belanja pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu negara, karena pendidikan yang berkualitas adalah pondasi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengalokasian dan penggunaan anggaran yang efektif dalam sektor pendidikan adalah kunci untuk

mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Efektivitas perencanaan anggaran dan koordinasi penyerapan anggaran belanja pendidikan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Perencanaan anggaran adalah langkah awal dalam pengelolaan sumber

daya pendidikan. Proses ini melibatkan penentuan alokasi dana untuk berbagai program dan inisiatif pendidikan. Perencanaan anggaran yang efektif harus memperhatikan berbagai faktor, termasuk jumlah siswa, kebutuhan infrastruktur, kualitas pengajaran, dan tujuan pendidikan nasional (Kusufi, 2017).

Sejumlah tantangan terkait perencanaan anggaran pendidikan meliputi ketidakpastian dalam sumber daya keuangan yang tersedia, perubahan kebutuhan pendidikan, serta tekanan untuk mengakomodasi beragam program dan proyek dalam anggaran yang terbatas. Dalam beberapa negara, perencanaan anggaran pendidikan juga dapat dipengaruhi oleh politik dan kebijakan yang berubah-ubah, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan dalam alokasi sumber daya.

Selain itu, perencanaan anggaran yang efektif harus mempertimbangkan prinsip-prinsip inklusivitas, yaitu memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas (Sasongko & Parulian, 2015). Hal ini mengharuskan perencanaan yang cermat dalam menjangkau daerah-daerah terpencil, komunitas miskin, dan kelompok-kelompok marginal. Setelah anggaran pendidikan disusun, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyerapan anggaran pendidikan, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga pendidikan, sangat penting. Koordinasi yang buruk dapat mengakibatkan penyerapan anggaran yang lambat atau tidak efisien.

Salah satu masalah umum yang muncul dalam koordinasi penyerapan anggaran adalah kesenjangan antara alokasi anggaran dan kemampuan pelaksanaan program pendidikan. Misalnya, mungkin terjadi situasi di mana sumber daya sudah dialokasikan untuk membangun sekolah baru, tetapi proses

konstruksi berjalan lambat atau terhambat karena berbagai alasan, seperti masalah perizinan atau manajemen konstruksi yang tidak efisien.

Koordinasi yang baik juga melibatkan pemantauan yang berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran. Pemantauan yang efektif dapat membantu mendeteksi potensi masalah atau penyelewengan dana lebih awal sehingga tindakan korektif dapat diambil tepat waktu. Selain itu, dalam konteks global yang terus berubah, negara-negara juga perlu memastikan bahwa sumber daya pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masa depan, seperti investasi dalam teknologi pendidikan dan peningkatan kualitas pengajaran.

Efektivitas perencanaan anggaran dan koordinasi penyerapan anggaran belanja pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat diakses oleh semua warga negara. Penelitian lebih lanjut tentang praktik terbaik dalam perencanaan anggaran pendidikan dan upaya kolaboratif antarinstansi pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya adalah langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam hal ini (Herriyanto, 2015). Melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan anggaran pendidikan dan koordinasi penyerapan anggaran, suatu negara dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat guna dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan meraih hasil pendidikan yang lebih baik.

Efektivitas Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran, merupakan faktor penting dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan anggaran disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana dokumen perencanaan ini memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan

secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang disebut dengan rencana kerja. Sehingga perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang disajikan akan berdampak pada program kerja yang tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran.

Menurut Nurkholis dan Moh. Khusaini (2019:4) pengertian dari perencanaan anggaran adalah sebagai berikut: "Perencanaan anggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dan ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai". Menurut I Putu Jati Arsana (2016:143) menjelaskan pengertian perencanaan anggaran sebagai berikut: "Perencanaan anggaran merupakan susunan langkah-langkah sistematis melalui upaya pemanfaatan sumber daya keuangan yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien."

Kemampuan mendefinisikan tujuan dan membuat strategi atau langkah yang akan dilakukan organisasi akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2013) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Tidak adanya konsep perencanaan penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Anggaran sebagai alat perencanaan di gunakan untuk (Mardiasmo, 2009): (a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai

dengan visi dan misi yang ditetapkan. (b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya. (c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatanyang telah disusun, dan (d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Perencanaan yang anggaran yang buruk adalah hambatan yang signifikan yang mencegah penyerapan anggaran. Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, diantaranya mengenai partisipasi, akurasi data, pengesahan APBD, pendekatan dan instrumen dalam penyusunan anggaran, perencanaan dan kebutuhan serta revisi atau perubahan (Zarinah, 2016)

Penyerapan Anggaran

Menurut Ravianto (dalam Masruri, 2014:11), efektivitas merupakan sebuah tolak ukur seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan. Artinya suatu pekerjaan dianggap efektif jika diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik waktu, biaya, maupun mutunya. Pengertian efektivitas sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan secara efektivitas menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atau dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa: efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Mardiasmo (2004:134) sebagaimana dikutip Alisman (2014:50), menyatakan bahwa efektivitas yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dimana

ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila telah mencapai tujuan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Dari pendapat di atas, maka efektivitas dapat diartikan sebagai sebuah pencapaian yang ingin dicapai oleh organisasi. Efektivitas berorientasi pada aspek tujuan suatu organisasi, jika tujuan tersebut tercapai, maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Halim (2014), bahwa penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertent

Koordinasi

Pengkoordinasian adalah setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan organisasi, karena itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu karyawan maka tujuan organisasi tidak akan tercapai. Koordinasi itu sangat penting di dalam suatu organisasi. (Fayol, 2008). Kesatuan komando adalah setiap bawahan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak Atasan yang memberikan perintah, maka karyawan yang bersangkutan akan sulit untuk membedakan prioritasnya. Hal ini juga akan menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikannya. (Fayol, 2008).

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengeluaran pemerintah yang mendukung

dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Sebagai negara yang sedang giat membangun, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian. Peran pemerintah disini dapat dinyatakan dalam bentuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia yang memberikan manfaat terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana jika segala sesuatunya dilakukan secara efektif dan efisien. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi rendahnya penyerapan anggaran seperti yang terjadi pada instansi Dinas Pendidikan dimana penyerapan anggarannya masih rendah dan mendapat raport merah, serapan anggaran yang di peroleh masih dibawah 90%. Selanjutnya, Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003:195). Sedangkan Menurut Manullang (2008:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan keseluruhan unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas didalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan didalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan kordinasi ini diartikan sebagai suatu

usaha kearah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature atau Library Research dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk menganalisis Efektivitas Perencanaan Anggaran dan Koordinasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan. dengan berbantuan referensi terkait dalam review literature. Literature yang digunakan adalah literature dari hasil penelitian atau review yang tersaji dalam artikel ilmiah berupatasi nasional dan internasional yang bersesuaian dengan manajemen sumber daya manusia. Semua artikel yang digunakan adalah bersumber dari mesin elektronik pencarian data literasi Mendeley dan Google scholar (Balqis, 2021). Alasan dilakukan penelitian kualitatif adalah penelitian tersebut memiliki sifat eksploratif. Sehingga kemudian dibahas lebih menyeluruh dengan bantuan Pustaka yang berhubungan dengan atau pustaka yang direview. , karena bagian tersebut adalah dasar perumusan hipotesis yang digunakan dalam perbandingan dengan hasil atau temuan-temuan dari hasil penelitian sebelumnya untuk mengungkap kebenaran dari teori yang ada (Permatasari and Jaelani, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan suatu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Perencanaan sebagai syarat mutlak sebelum kegiatan berlangsung. Tanpa adanya perencanaan

yang matang, maka suatu kegiatan yang dilaksanakan mengalami hambatan, bahkan gagal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berkaitan dengan manajemen pembiayaan anggaran, perencanaan memiliki peran yang sangat penting, karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, baik berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber dana. Proses perencanaan dalam rangka penyusunan program dan pengembangan dari kegiatan evaluasi kinerja. sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar mengimplementasikan sistem SP4 dalam proses perencanaan dan penganggarannya, dimana dalam pelaksanaannya menggunakan sistem *bottom up*.

Penetapan skala prioritas didasarkan atas analisis kebutuhan yang dianggap mendesak. Berdasarkan standar operasional prosedur perencanaan dan penganggaran penyusunan rencana pembiayaan Pendidikan diimplementasikan dalam kegiatan penyusunan rencana kerja. Hasil dari penelitian adanya hubungan yang sangat signifikan antara Perencanaan Anggaran dengan Efektivitas Penyerapan Anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal, M. (2018), Nugroho, R., & Alfarisi. (2017), Putri, K.M.R., Yuniarta, G.A., & Prayudi, M.A., (2017), Zarinah, M.

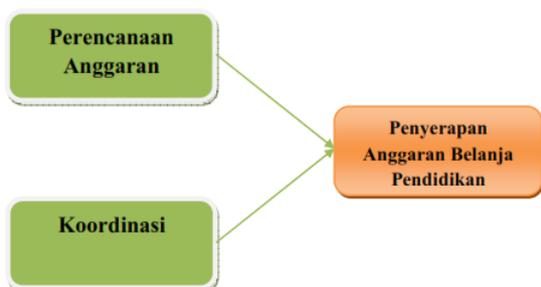
Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan

Pengaruh Koordinasi terhadap Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pendidikan adalah Pengaruh koordinasi terhadap penyerapan APBD Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa Kordinasi berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD Dinas Pendidikan. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikansi regresi variabel Koordinasi sebesar 0,000 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan

perbandingan nilai T_{hitung} dan T_{tabel} ($4.322 > 1.688$).

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh koordinasi dari seluruh komponen organisasi yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap penyerapan APBD di Dinas Pendidikan berbasis kinerja yang baik/tinggi, demikian sebaliknya bila tingkat koordinasi dari seluruh komponen organisasi rendah/buruk maka penyerapan APBD akan rendah/buruk. Menurut Manulang (2001:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Koordinasi berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Dimana nilai signifikansi regresi variabel Koordinasi sebesar 0,000 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05.

Kerangka konsep pada penelitian ini disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka konsep penelitian

PENUTUP

Berdasarkan kajian literature review pada artikel ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan.

2. Koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan pada artikel ini, penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda sehingga terdapat perbandingan pada hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadan Ramadhani, Indi Zaenur Anisa (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- Fayol, Henry. 2008. Manajemen Public Relations. Jakarta: PT. Elex Media.
- Handoko, T. Hani dan Reksohadiprodjo. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perusahaan. Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu, SP. 2009. Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husniati, Sunandar, Erfina, Jamaluddin Ahmad (2018) Pengaruh Koordinasi Dan Kesatuan Komando Terhadap Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Masruri. 2014. Analisis Efektifitas Program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan. Padang: Akademia Permata.
- Manullang, 2008, Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Nurkholis dan Moh. Khusaini. 2019. Penganggaran Sektor Publik. Malang: UB Press.
- Ruwaida, Darwanis, Syukriy Abdullah (2015) Faktor-faktor yang

- mempengaruhi Realisasi Anggaran Pendidikan di Provinsi Aceh
- Rifka Ramadhani, Mia Angelina Setiawan (2019) Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, SDM dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD provinsi Sumatra Barat
- Sasongko dan Parulian. 2015. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Silpi Wulandari (2020). Analisis Faktor-Faktor Ketidakefektifan Penyerapan Anggaran Di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018
- Yekti Setyawati (2021). Studi Fenomenologi Penyerapan Anggaran Pendidikan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Zarinah, M. 2016. "Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualias Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara". Jurnal Magister Akuntansi. Volume 5, No. 1.